

Demokrasi Indonesia di persimpangan: harapan rakyat dan realitas politik

Dila Olga Naeda

¹Program Studi Manajemen, ² Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 250501110164@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Demokrasi, Politik, Rakyat, Pemerintahan, Keadilan

Keywords:

Democracy, Politics, Society, Government, Justice

ABSTRAK

Demokrasi Indonesia lahir dari perjuangan bangsa untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan kebebasan dalam kehidupan bernegara. Artikel ini membahas perkembangan demokrasi di Indonesia, harapan masyarakat terhadap demokrasi, realitas politik yang terjadi, serta upaya memperkuat demokrasi agar lebih berpihak kepada rakyat. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia telah berkembang sejak masa parlementer hingga era reformasi yang lebih terbuka terhadap partisipasi masyarakat. Namun, saat ini demokrasi masih menghadapi berbagai tantangan seperti korupsi, politik uang, dominasi elite politik, serta penyebaran hoaks dan polarisasi di media sosial. Maka dari itu, diperlukan pendidikan politik, penegakan hukum yang tegas, dan peningkatan partisipasi masyarakat untuk menciptakan demokrasi yang lebih adil, transparan, dan mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat.

ABSTRACT

Indonesian democracy was born from the nation's struggle to achieve people's sovereignty and freedom in state life. This article discusses the development of democracy in Indonesia, public expectations of democracy, political realities, and efforts to strengthen democracy so that it better serves the people. The results of the discussion show that Indonesian democracy has developed from the parliamentary era to the reform era, which is more open to public participation. However, democracy still faces various challenges such as corruption, money politics, domination of political elites, as well as the spread of hoaxes and polarization on social media. Therefore, political education, strict law enforcement, and increased public participation are needed to create a more just, transparent, and prosperous democracy.

Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman agama, suku, budaya, dan bahasa. Dalam kondisi tersebut, suatu negara perlu dijalankan dengan suatu sistem pemerintahan yang baik, agar dapat diarahkan, dan menjadi jalan yang umum bagi seluruh rakyat (Manurung dkk., 2022). Demokrasi menjadi sistem pemerintahan yang dianggap paling sesuai karena mampu memberikan hak kepada rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam jalannya politik dengan tujuan menjaga persatuan bangsa. Demokrasi memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin dan menyampaikan pendapat dalam kehidupan bernegara. Demokrasi memberikan pemahaman, bahwa sebuah kekuasaan berasal dari rakyat. Dengan pemahaman tersebut, lahirlah aturan yang mampu memberikan manfaat serta melindungi hak-hak rakyat (Noviati, 2013).

Pada zaman Yunani Kuno pertama kali demokrasi muncul, dimana masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan oleh pemerintah saat itu (Manurung



dkk., 2022). Demokrasi di Indonesia lahir dari perjuangan bangsa melawan penjajahan. Pada masa kolonial, rakyat Indonesia tidak memiliki kebebasan dalam menentukan pemerintahan sendiri. Oleh sebab itu, para tokoh nasional memperjuangkan sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan kepada rakyat. Setelah Indonesia merdeka, demokrasi mulai diterapkan sebagai dasar dalam kehidupan politik dan ketatanegaraan. Demokrasi merupakan suatu sistem untuk melakukan perubahan terhadap praktik pemerintahan di masa lalu dengan menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam menentukan pemimpin, sehingga kekuasaan pemerintah dapat berjalan di bawah pengawasan masyarakat. Selain itu, demokrasi Indonesia dipengaruhi oleh budaya lokal seperti musyawarah dan gotong royong yang menjunjung asas kebersamaan (Yusron Kamil dkk., 2023). Nilai tersebut telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia sejak dahulu. Sehingga demokrasi Indonesia tidak hanya menekankan kebebasan politik, tetapi juga mengutamakan kebersamaan dan persatuan bangsa.

Namun, upaya mewujudkan sistem demokrasi yang kuat masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam pelaksanaan kebijakan publik serta rendahnya kualitas partisipasi politik masyarakat yang bersifat substantif. (Hidayat, 2025). Selain itu, demokrasi Indonesia juga menghadapi tantangan dalam menyelaraskan kepentingan berbagai kelompok masyarakat sekaligus menjamin berjalannya sistem hukum secara efektif dan efisien. Di sisi lain, berbagai permasalahan seperti korupsi, politik uang, dan konflik politik di tengah masyarakat masih menjadi hambatan dalam mewujudkan demokrasi yang sehat dan berkualitas. Perkembangan media sosial juga menyebabkan munculnya polarisasi politik yang memicu perpecahan di tengah masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia berada di persimpangan antara harapan rakyat dan realitas politik (Hanisa & Firdaus, 2023). Oleh karena itu, artikel ini membahas perkembangan demokrasi Indonesia serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam kehidupan politik saat ini. Pembahasan ini penting untuk memahami bagaimana demokrasi Indonesia dapat berkembang menjadi sistem yang lebih baik dan berpihak kepada rakyat.

Pembahasan

Lahirnya Demokrasi di Indonesia

Pada masa penjajahan, Indonesia masih berjuang menghadapi Belanda yang ingin kembali ke Indonesia. Rakyat Indonesia hidup di bawah kekuasaan kolonial yang bersifat otoriter. Masyarakat pribumi tidak memiliki kebebasan politik, hak berbicara, maupun kesempatan untuk menentukan pemimpin dan arah pemerintahan sendiri. Kekuasaan kolonial lebih mengutamakan kepentingan ekonomi dan politik Belanda dibanding kesejahteraan rakyat Indonesia. Rakyat tidak memiliki hak untuk menentukan pemerintahan sendiri sehingga muncul berbagai gerakan perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan dan kebebasan politik. Perjuangan tersebut menjadi awal lahirnya semangat demokrasi di Indonesia (Wijaya, 2014).

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, demokrasi mulai diterapkan sebagai dasar dalam sistem pemerintahan negara. UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan

berada di tangan rakyat, sehingga masyarakat memiliki hak untuk menentukan arah dan jalannya pemerintahan. Hal tersebut tercermin dalam Pasal 4 Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyatakan bahwa sebelum MPR, DPR, dan DPA dibentuk berdasarkan UUD, seluruh kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan bantuan KNIP. Demokrasi kemudian dipilih sebagai sistem pemerintahan karena dianggap mampu memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan menentukan arah pemerintahan negara (Faslah, 2025). Praktik demokrasi berdasarkan UUD 1945 mengalami perkembangan dalam beberapa masa (Noviati, 2013);

- a. Masa Republik Indonesia I yang menerapkan demokrasi parlementer dengan menonjolkan peran parlemen dan partai politik dalam pemerintahan;
- b. Masa Republik Indonesia II yang dikenal sebagai demokrasi terpimpin, di mana kekuasaan lebih terpusat dan dalam banyak aspek menyimpang dari prinsip demokrasi konstitusional;
- c. Masa Republik Indonesia III, yaitu demokrasi Pancasila yang menekankan sistem presidensial dan berlangsung hingga berakhirnya rezim Orde Baru. Setelah itu, Indonesia memasuki era reformasi yang ditandai dengan perubahan UUD 1945 serta meningkatnya keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi.

Sementara itu, Soehino meninjau perkembangan demokrasi di Indonesia berdasarkan sistem pemerintahan yang diterapkan dalam setiap periode sejarah ketatanegaraan yakni, (Noviati, 2013);

- a) 18 Agustus 1945 - 14 November 1945 menganut sistem demokrasi konstitusional;
- b) 14 November 1945 - 5 Juli 1959 menganut sistem demokrasi liberal;
- c) 5 Juli 1959 - 21 Maret 1968 menganut sistem demokrasi terpimpin;
- d) 21 Maret 1968 - sekarang (berjalan hingga berakhirnya pemerintahan orde baru 1998) menganut sistem demokrasi pancasila)

Sementara konsep demokrasi modern mulai dikenal melalui pelajar Indonesia yang belajar di Eropa dan membawa pemikiran tentang kebebasan, persamaan hak, serta kedaulatan rakyat ketika kembali ke Indonesia. Pemikiran tersebut mendorong munculnya diskusi publik dan semangat perjuangan nasional. Salah satu tokoh yang berperan penting dalam perkembangan demokrasi Indonesia adalah Mohammad Hatta (M Salman Alfariji, 2024).

- a. Demokrasi Parlementer (1945–1959)
Demokrasi parlementer merupakan sistem yang menempatkan parlemen sebagai pusat kekuasaan pemerintahan. Pada masa ini, Indonesia menyelenggarakan Pemilu 1955 yang diikuti oleh berbagai partai politik sebagai wujud pelaksanaan demokrasi. Sistem tersebut memberikan ruang kebebasan politik yang cukup luas bagi masyarakat, namun seringnya pergantian kabinet menyebabkan kondisi pemerintahan menjadi kurang stabil.
- b. Demokrasi Terpimpin (1959–1965)
Demokrasi terpimpin mulai diterapkan setelah Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959. Dalam sistem ini, kekuasaan pemerintahan lebih

terpusat kepada presiden dengan tujuan menjaga stabilitas politik negara. Namun, kondisi tersebut menyebabkan peran partai politik dan parlemen menjadi lebih terbatas dalam proses pemerintahan.

c. Demokrasi Pancasila Era Orde Baru (1965–1998)

Pada masa pemerintahan Soeharto, Indonesia menerapkan Demokrasi Pancasila yang berfokus pada stabilitas politik dan pembangunan ekonomi nasional. Meskipun tetap menggunakan sistem demokrasi, kebebasan politik masyarakat pada masa tersebut masih berada di bawah pengawasan dan pembatasan pemerintah.

d. Demokrasi Reformasi (1998–Sekarang)

Era reformasi dimulai setelah berakhirnya pemerintahan Soeharto pada tahun 1998. Pada periode ini, demokrasi Indonesia mengalami perkembangan yang lebih terbuka melalui kebebasan pers, pelaksanaan pemilu yang lebih demokratis, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik dan pengawasan terhadap pemerintah.

Harapan Rakyat terhadap Demokrasi

Demokrasi memberikan harapan besar bagi masyarakat Indonesia untuk menciptakan kehidupan bernegara yang lebih adil, bebas, dan sejahtera. Dalam sistem demokrasi, rakyat menjadi pemegang kekuasaan tertinggi sehingga masyarakat berharap pemerintah mampu menjalankan kekuasaan berdasarkan kepentingan rakyat, bukan hanya kepentingan kelompok tertentu. Salah satu ciri utama negara yang menganut sistem demokrasi dapat dilihat dari sejauh mana pemerintah melibatkan masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan proses pemilihan umum (Noor dkk., 2023). Demokrasi diharapkan dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan pendapat secara bebas tanpa adanya tekanan maupun diskriminasi. Kebebasan berpendapat tersebut merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat dan terbuka.

Selain itu, masyarakat berharap demokrasi mampu menghadirkan pemerintahan yang adil dan transparan. Rakyat menginginkan pemimpin yang dipilih melalui pemilu dapat menjalankan amanah dengan jujur, bertanggung jawab, dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Pada dasarnya, demokrasi sebagai landasan kehidupan bermasyarakat dan bernegara mengandung makna bahwa rakyat memiliki hak untuk menentukan berbagai keputusan yang berkaitan dengan kehidupan mereka, termasuk dalam menilai kebijakan negara karena kebijakan tersebut akan berdampak langsung terhadap masyarakat (Basuki, 2020). Dalam sistem demokrasi, pemerintah seharusnya bekerja untuk melayani rakyat, bukan memanfaatkan kekuasaan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Maka dari itu, masyarakat sangat berharap demokrasi dapat menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Harapan masyarakat agar demokrasi mampu menciptakan pemerintahan yang bersih mencerminkan adanya aspirasi terhadap terwujudnya *good governance* sebagai salah satu tujuan utama dalam proses demokratisasi (Burmias & Mesra, 2025).

Harapan rakyat terhadap demokrasi juga berkaitan dengan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Masyarakat berharap pemerintah mampu menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan kualitas pendidikan, serta

memberikan pelayanan kesehatan yang baik dan merata. Demokrasi tidak hanya dipahami sebagai kebebasan politik semata, tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. Dalam hal ini, kebijakan pemerintah diharapkan benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat kecil dan mampu mengurangi kesenjangan sosial di Masyarakat (H.Nihaya M, 2011).

Selain mewujudkan kesejahteraan, masyarakat juga berharap demokrasi mampu menjaga persatuan bangsa di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan pandangan politik yang ada di Indonesia. Demokrasi yang sehat seharusnya mampu menciptakan kehidupan politik yang damai, saling menghargai, dan menjunjung tinggi toleransi. Perbedaan pilihan politik seharusnya tidak menjadi penyebab perpecahan, melainkan menjadi bagian dari proses demokrasi yang wajar dalam kehidupan bernegara. Namun, terdapat beberapa persoalan utama yang dapat mengancam persatuan bangsa, salah satunya adalah munculnya politik identitas dalam proses demokrasi. Politik identitas terjadi ketika para politisi memanfaatkan dan mementingkan unsur ras, suku, dan agama untuk memperoleh dukungan serta suara terbanyak dari masyarakat. Oleh karena itu, demokrasi harus mampu berperan dalam menjaga persatuan bangsa di tengah keberagaman yang ada (Retnawati dkk., 2023). Di era modern saat ini, masyarakat juga berharap demokrasi mampu memberikan ruang partisipasi yang lebih luas bagi generasi muda. Anak muda diharapkan tidak hanya menjadi penonton dalam kehidupan politik, tetapi juga ikut aktif dalam mengawasi pemerintah, menyampaikan kritik, dan memberikan gagasan demi kemajuan bangsa. Dengan adanya partisipasi masyarakat yang tinggi, demokrasi Indonesia diharapkan dapat berkembang menjadi sistem pemerintahan yang lebih kuat, adil, dan benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat (Lutfi, 2025).

Realitas Politik di Indonesia

Dalam praktiknya, demokrasi di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan yang menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan rakyat dan kenyataan politik yang terjadi. Meskipun Indonesia telah melaksanakan sistem demokrasi melalui pemilihan umum secara langsung, kebebasan pers, dan kebebasan berpendapat, pelaksanaan demokrasi masih sering diwarnai oleh berbagai kepentingan politik yang tidak sepenuhnya berpihak kepada rakyat. Demokrasi yang seharusnya menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat terkadang justru digunakan sebagai alat untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan (Hidayat, 2025).

Salah satu masalah utama dalam realitas politik Indonesia adalah praktik politik uang. Dalam setiap pemilihan umum, masih sering ditemukan tindakan pemberian uang, sembako, atau bantuan tertentu kepada masyarakat untuk mempengaruhi pilihan politik mereka. Kondisi ini menyebabkan kualitas demokrasi menjadi menurun karena masyarakat tidak memilih berdasarkan kemampuan, visi, dan program kerja calon pemimpin, melainkan karena faktor materi. Politik uang juga membuat proses demokrasi menjadi tidak sehat dan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan setelah pemimpin terpilih (Pahlevi & Amrurrobi, 2020).

Selain politik uang, korupsi juga menjadi persoalan besar dalam kehidupan politik Indonesia. Banyak pejabat negara yang terlibat kasus korupsi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi menunjukkan bahwa masih lemahnya integritas dan tanggung jawab sebagian pemimpin terhadap amanah rakyat. Korupsi juga berdampak pada terhambatnya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat karena anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik justru disalahgunakan demi kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga politik semakin menurun. (Hidayat, 2025).

Perkembangan media sosial di era digital juga membawa pengaruh besar terhadap kondisi politik Indonesia. Media sosial memang memberikan ruang kebebasan berpendapat bagi masyarakat, tetapi di sisi lain juga memunculkan berbagai masalah seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan propaganda politik. Informasi palsu sering digunakan untuk menyerang lawan politik dan mempengaruhi opini publik. Hal tersebut menyebabkan munculnya polarisasi politik di masyarakat, di mana perbedaan pilihan politik sering menimbulkan konflik dan perpecahan sosial (Nurmansyah dkk., 2026). Realitas politik di Indonesia juga menunjukkan masih kuatnya dominasi elite politik dalam pengambilan kebijakan. Banyak keputusan politik yang dianggap lebih mengutamakan kepentingan kelompok tertentu dibanding kepentingan rakyat secara luas. Dalam beberapa kasus, masyarakat merasa bahwa suara mereka kurang didengar dan aspirasi rakyat belum sepenuhnya menjadi prioritas dalam pemerintahan. Kondisi ini menyebabkan munculnya rasa kecewa dan sikap apatis sebagian masyarakat terhadap dunia politik (Hidayat, 2025).

Selain itu, partisipasi politik masyarakat terkadang masih bersifat sementara dan hanya meningkat ketika menjelang pemilu. Kebanyakan Masyarakat masih bersifat pasif terhadap kesadaran politik mereka (Zuhroh, 2014). Setelah pemilu selesai, banyak masyarakat yang kurang aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Padahal dalam sistem demokrasi, masyarakat memiliki peran penting tidak hanya dalam memilih pemimpin, tetapi juga dalam mengontrol kebijakan pemerintah agar tetap berjalan sesuai kepentingan rakyat. Menurunnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik disebabkan oleh pandangan bahwa pemerintah sulit dipengaruhi dalam proses pengambilan keputusan, sehingga keterlibatan aktif dalam politik dianggap tidak memberikan dampak yang berarti. Itulah mengapa perlu ada system demokrasi yang baik untuk menunjang partisipasi baik dari masyarakat (Biru, 2019).

Meskipun demikian, demokrasi Indonesia tetap mengalami perkembangan yang cukup baik dibanding masa sebelumnya. Kebebasan pers semakin terbuka, masyarakat lebih berani menyampaikan kritik terhadap pemerintah, dan generasi muda mulai aktif dalam isu-isu sosial serta politik (Hidayat, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia masih memiliki peluang untuk berkembang menjadi lebih baik apabila didukung oleh kesadaran politik masyarakat, penegakan hukum yang tegas, dan komitmen pemerintah dalam menjalankan demokrasi secara jujur dan adil.

Upaya Memperkuat Demokrasi Indonesia

Penguatan demokrasi di Indonesia tidak cukup hanya dilakukan melalui pelaksanaan pemilu secara rutin, tetapi juga harus diiringi dengan perbaikan kualitas sistem politik dan kesadaran masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Selama ini, demokrasi di Indonesia sering kali hanya dipahami sebagai proses memilih pemimpin setiap lima tahun sekali (Nabila, 2021). Padahal demokrasi yang sehat seharusnya mampu menghadirkan keadilan, kesejahteraan, serta pemerintahan yang benar-benar berpihak kepada rakyat untuk kedaulatan rakyat. Sebagai wujud dari prinsip kedaulatan rakyat, sistem demokrasi harus menjamin keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, pengawasan, hingga penilaian terhadap jalannya fungsi-fungsi kekuasaan negara (Basuki, 2020). Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius untuk memperkuat demokrasi agar tidak hanya menjadi simbol politik, tetapi juga menjadi sistem yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Salah satu upaya penting dalam memperkuat demokrasi adalah meningkatkan pendidikan politik masyarakat. Perluasan pengetahuan serta pemahaman mengenai literasi politik dan media, khususnya bagi generasi muda, menjadi hal yang sangat penting untuk membangun kesadaran politik yang kritis dan bertanggung jawab (Zaman, 2023). Rendahnya pemahaman politik menyebabkan sebagian masyarakat masih mudah dipengaruhi oleh politik uang, propaganda, dan informasi palsu di media sosial. Maka dari itu, upaya pencegahan terhadap praktik tersebut dapat dimulai melalui pemberian pendidikan politik kepada masyarakat mengenai bahaya dan dampak negatif politik uang. (Pahlevi & Amrurrobi, 2020). Pendidikan politik perlu dilakukan tidak hanya menjelang pemilu, tetapi juga secara berkelanjutan melalui sekolah, kampus, organisasi masyarakat, dan media. Masyarakat harus diberikan pemahaman bahwa memilih pemimpin bukan berdasarkan popularitas atau pemberian materi, melainkan berdasarkan integritas, kemampuan, dan program kerja yang jelas. Tanpa pendidikan politik yang memadai, demokrasi berpotensi terus dimanfaatkan oleh elite politik untuk memperoleh kekuasaan melalui cara-cara yang tidak sehat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih sistematis dan terstruktur dari seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mewujudkan Indonesia yang lebih demokratis, adil, dan berkeadaban (Bashori, 2018).

Selain pendidikan politik, penegakan hukum juga menjadi faktor penting dalam memperkuat demokrasi Indonesia. Selama ini, hukum sering dianggap tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas karena masih banyak kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang tidak ditangani secara maksimal. Kondisi tersebut menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan transparan tanpa memandang jabatan, kekuasaan, maupun status sosial seseorang. Seperti dengan supremasi hukum yakni, penegakan hukum merupakan upaya menempatkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara guna melindungi seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya intervensi maupun pengaruh dari pihak mana pun, termasuk penyelenggara negara. Demokrasi tidak akan berjalan dengan baik apabila hukum masih dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu (Idayanti dkk., 2020).

Penguatan demokrasi juga harus dilakukan melalui perbaikan etika politik para pemimpin dan partai politik. Dalam kenyataannya, politik di Indonesia sering kali lebih berorientasi pada perebutan kekuasaan dibanding perjuangan untuk kepentingan rakyat. Banyak elite politik yang menggunakan isu agama, suku, dan identitas sosial bahkan dengan politik uang untuk memperoleh dukungan politik sehingga memicu konflik dan perpecahan di masyarakat. Kondisi tersebut berpotensi menghasilkan pemimpin yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Akibatnya, pemerintahan yang terbentuk menjadi kurang representatif dan akuntabel karena pemimpin yang terpilih cenderung lebih mengutamakan kepentingan pribadi maupun kelompok dibanding kepentingan rakyat. Politik identitas yang berlebihan dapat merusak persatuan bangsa dan menghilangkan nilai demokrasi yang seharusnya menghargai perbedaan. Oleh sebab itu, para pemimpin politik harus lebih mengutamakan kepentingan nasional dibanding kepentingan kelompok atau pribadi (Pahlevi & Amrullohi, 2020).

Di era digital saat ini, penguatan demokrasi juga memerlukan pengawasan terhadap penyebaran informasi di media sosial. Kemajuan teknologi memang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat, tetapi di sisi lain perkembangan tersebut juga memunculkan penyebaran hoaks, ujaran kebencian, serta narasi provokatif dan propaganda politik yang berpotensi memecah belah masyarakat. Pemerintah, media, dan masyarakat perlu bekerja sama dalam meningkatkan literasi digital agar masyarakat mampu memilah informasi secara kritis serta tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu politik yang bersifat menyesatkan. Demokrasi yang sehat harus dibangun di atas informasi yang jujur dan terbuka, bukan manipulasi opini publik (Nurmansyah dkk., 2026).

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam demokrasi juga perlu ditingkatkan. Selama ini, banyak masyarakat yang hanya aktif saat pemilu tetapi kurang terlibat dalam mengawasi jalannya pemerintahan setelah pemilu selesai. Padahal dalam sistem demokrasi, masyarakat memiliki hak dan tanggung jawab untuk mengkritik, mengawasi, dan memberikan masukan kepada pemerintah. Setiap masyarakat diharapkan secara aktif mengajukan alternatif kebijakan publik yang berbeda dari kebijakan pemerintah, memberikan kritik dan saran perbaikan terhadap kebijakan umum, memilih pemimpin pemerintahan, serta berpartisipasi dalam berbagai proses demokrasi lainnya. Sikap apatis terhadap politik justru akan memberikan ruang lebih besar bagi penyalahgunaan kekuasaan dan praktik politik yang tidak sehat (Biru, 2019).

Pada akhirnya, penguatan demokrasi Indonesia membutuhkan kerja sama antara pemerintah, lembaga hukum, media, dan masyarakat. Demokrasi tidak akan berkembang apabila hanya dijadikan alat untuk memperoleh kekuasaan tanpa memperhatikan kepentingan rakyat. Demokrasi yang kuat harus dibangun melalui kejujuran politik, penegakan hukum yang adil, pendidikan politik yang baik, serta kesadaran masyarakat untuk menjaga persatuan dan mengawasi jalannya pemerintahan. Dengan demikian, demokrasi Indonesia dapat berkembang menjadi demokrasi yang lebih matang, kritis, dan benar-benar mencerminkan kedaulatan rakyat.

Kesimpulan dan Saran

Demokrasi Indonesia merupakan sistem pemerintahan yang lahir dari perjuangan panjang bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan dan memperjuangkan kedaulatan rakyat. Demokrasi dipilih sebagai dasar kehidupan bernegara karena dianggap mampu memberikan hak kepada masyarakat untuk ikut menentukan arah pemerintahan serta menjamin kebebasan dan persamaan hak bagi seluruh warga negara. Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan mulai dari demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru, hingga demokrasi reformasi yang berlangsung sampai sekarang. Setiap periode memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri yang menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia terus mengalami perkembangan sesuai dengan kondisi sosial dan politik masyarakat.

Dalam praktiknya, demokrasi Indonesia telah memberikan banyak perubahan positif, seperti adanya pemilihan umum secara langsung, kebebasan pers, dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik. Reformasi tahun 1998 menjadi titik penting dalam perkembangan demokrasi Indonesia karena membuka ruang kebebasan yang lebih luas bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan mengawasi jalannya pemerintahan. Demokrasi juga memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung sebagai bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat. Namun demikian, demokrasi Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang cukup serius. Praktik politik uang, korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, serta dominasi elite politik masih sering terjadi dalam kehidupan politik Indonesia. Selain itu, perkembangan media sosial juga menyebabkan meningkatnya polarisasi politik dan penyebaran informasi palsu yang dapat memicu konflik di tengah masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia masih menghadapi kesenjangan antara harapan rakyat dan realitas politik yang terjadi saat ini.

Oleh karena itu, demokrasi Indonesia perlu terus diperkuat agar tidak hanya menjadi demokrasi yang bersifat prosedural, tetapi juga demokrasi yang substantif dan benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat. Penguatan demokrasi dapat dilakukan melalui pendidikan politik, penegakan hukum yang tegas, peningkatan kesadaran masyarakat, serta penguatan etika politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, demokrasi Indonesia diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang adil, bersih, demokratis, dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk memperkuat demokrasi Indonesia, diperlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga negara, dan masyarakat dalam menjaga nilai-nilai demokrasi. Pemerintah harus mampu menciptakan sistem politik yang jujur, adil, dan transparan serta menegakkan hukum secara tegas terhadap kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, masyarakat juga perlu meningkatkan kesadaran politik dan berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan demokrasi. Pendidikan politik sangat penting untuk membangun sikap kritis, menghargai perbedaan pendapat, dan menolak praktik politik uang. Dengan adanya kerja sama yang baik antara pemerintah

dan masyarakat, demokrasi Indonesia diharapkan dapat berkembang menjadi lebih sehat, adil, dan benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.

Daftar Pustaka

- Bashori, K. (2018). Pendidikan Politik di Era Disrupsi. *Sukma: Jurnal Pendidikan*, 2(2), 287–310. <https://doi.org/10.32533/02207.2018>
- Basuki, U. (2020). Parpol, Pemilu dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Demokrasi. *Kosmik Hukum*, 20(2), 81. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v20i2.8321>
- Biru, M. I. R. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Kutai Kartanegara. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 8(2).
- Burmias, H. I., & Mesra, R. (2025). Pandangan Masyarakat di Desa Powalutan tentang Demokrasi Politik Kekinian. *ETIC (EDUCATION AND SOCIAL SCIENCE JOURNAL)*, 2.
- Faslah, R. (2025). *Pancasila sebagai dasar negara dan panduan hidup berbangsa*. UIN Malang Press, Malang. <http://repository.uin-malang.ac.id/24376/>
- Hanisa, I., & Firdaus, S. U. (2023). Dinamika Demokrasi dalam Kebijakan Publik: Tantangan dan Peluang Bagi Sistem Hukum Indonesia. *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 2.
- Hidayat, S. (2025). Demokrasi di Indonesia: Tantangan dan Solusi. *Journal of Civic Education Research*, 3(1).
- H.Nihaya M. (2011). Demokrasi dan Problematikanya di Indonesia. *Sulesana*, 6.
- Idayanti, S., Haryadi, T., & Widyastuti, T. V. (2020). Penegakan Supremasi Hukum Melalui Implementasi Nilai Demokrasi. *Diktum : Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 83–93. <https://doi.org/10.24905/diktum.v8i1.85>
- Lutfi, M. (2025, Desember 3). *Dominasi Elit: Suatu Paradok Demokrasi Konstitusional “Antara Ancaman Atau Keniscayaan”*. <https://repository.uin-malang.ac.id/25060/>
- M Salman Alfariji. (2024). Kondisi Demokrasi Indonesia Antara Harapan dan Kekhawatiran Pasca Pemilu 2024. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Pendidikan*, 1(1), 32–40. <https://doi.org/10.62951/prosemnasipi.v1i1.5>
- Manurung, C. E., Zee, C., Nathanael, N., & Ernando, R. (2022). Perkembangan Sistem Demokrasi di Indonesia dan Relevansinya untuk Kehidupan di Tahun 2022. *FORIKAMI (Forum Riset Ilmiah Kajian Masyarakat Indonesia)*, 1, 1–16.
- Nabila, W. S. (2021). *Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia*. Open Science Framework. <https://doi.org/10.31219/osf.io/cqe6d>
- Noor, E. S. P., Ahmadi Hasan, & Masyithah Umar. (2023). Demokrasi di Indonesia Mewujudkan Kedaulatan Rakyat. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 1(4), 679–693. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v1i4.196>

- Noviati, C. E. (2013). *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan*. 10.
- Nurmansyah, C. A., Juwono, M. P., & Khairiyah, N. (2026). Literasi Digital Dan Transformasi Kesadaran Kewarganegaraan Mahasiswa Dalam Ekosistem Demokrasi Digital. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2).
- Pahlevi, M. E. T., & Amrurrobi, A. A. (2020). Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 06(1).
- Retnawati, R., Al Khanzah, R., Purnamasari, I., & Redjosari, S. M. (2023). Demokrasi: Antara Harapan Dan Realitas. *Indonesian Journal of Political Studies (IJPS)*, 3(2), 140–149. <https://doi.org/10.15642/ijps.2023.3.2.140-149>
- Wijaya, A. (2014). Demokrasi dalam Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia. *al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 4(01), 136–158. <https://doi.org/10.15642/ad.2014.4.01.136-158>
- Yusron Kamil, Y., Rini Ojtaviani, Sukron, & M. Fadhil Seprinaldi. (2023). Musyawarah Sebagai Landasan Demokrasi Dalam Pemikiran Islam. *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir*, 6(2), 237–245. <https://doi.org/10.58518/alfurqon.v6i2.1869>
- Zaman, S. (2023). Edukasi Literasi Politik dan Media untuk Generasi Muda: Kesiapan Menghadapi Tahun Politik 2024. *Malang Imes.com*. <https://repository.uin-malang.ac.id/14993/>
- Zuhroh, N. (2014). Perilaku Sosial Budaya Politik dan Aktivitas Religi Masyarakat Indonesia. *J-PIPS (Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial)*, 1(1), 35–59. <https://repository.uin-malang.ac.id/8849/>